DPRD
KOTA BATAM

MEDIA KOMUNIKASI & INFORMASI

BULETIN

DPRD KOTA BATAM

Laksanakan Fungsi Bangun Negeri

Edisi :
Maret
2022

DPRD BATAM USULKAN RANPERDA

DANA BOS

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam telah mengajukan usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggara-kan oleh Masyarakat.

Baca Halaman 07

dprd_kotaBatam @dprdbatam Dprdkota Batam dprdbatamku dprdkotabtm@gmail.com

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM

DPRD
KOTA BATAM

Kebersamaan Laksanakan Fungsi Solidaritas Bangun Negeri

Aspawi Nangali,S.Sos,MM
Sekretaris DPRD Kota Batam

Youtube dprd_kotaBatam
Twitter @dprdbatam
Facebook Dprdkota Batam
Instagram dprdbatamku
Email dprdkotabtm@gmail.com

AYO KITA PELAJARI TENTANG

COVID-19 DAN CARA MENCEGAHNYA

APA ITU COVID-19?

Novel Coronavirus (Covid-19) adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan yang berasal dari China. Novel Coronavirus merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS dengan **gejala sebagai berikut** :

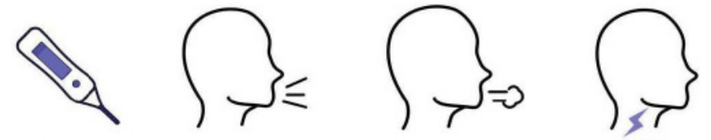

PHYSICAL DISTANCING

Membatasi kontak fisik langsung dan menjaga jarak aman minimal 1 Meter ketika berinteraksi dengan orang lain

GUNAKAN MASKER

Selalu gunakan masker saat bepergian untuk mencegah virus yang masuk kedalam saluran pernafasan

OLAHRAGA

Olahraga yang cukup secara rutin agar imunitas tubuh tidak menurun dan rentan terhadap virus

MENCUCI TANGAN

Mencuci tangan secara rutin selama 20 Detik untuk membersihkan tangan dari kuman dan penyakit

KONSUMSI MAKANAN MATANG

Makan makanan sehat dan matang untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah penyakit

JAUHI HEWAN LIAR

Minimalisir kontak fisik dengan hewan liar karena ada kemungkinan hewan tersebut adalah carrier virus

ANGGOTA DPRD BATAM SEBUT KEMUNGKINAN WISMAN SINGAPURA KELUAR DARI KAWASAN TRAVEL BUBBLE

Kalau begini terus, nanti kebijakan Travel Bubble Kepri dicabut lagi. Tentu akan berpengaruh ke masyarakat lagi. Belum lagi kemungkinan penyebaran, dan perekonomian kita akan anjlok lagi

Udin P Sihaloho
Anggota Komisi II DPRD Batam

BATAM-Pasca kemeriahaan penyambutan Wisatawan Mancanegara (Wisman) asal Singapura, Rabu sore kemarin.

Anggota Komisi II DPRD Batam, Udin P Sihaloho saat ini mempertanyakan sistem pengawasan, yang akan dilakukan bagi para Wisman di area Travel Bubble.

Udin menilai pertanyaan mengenai sistem pengawasan, wajar dikarenakan pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Buralimar yang menyebut bahwa kewenangan dikembalikan ke masing-masing managemet Resort, yang menjadi lokasi karantina.

"Saya merasa pertanyaan ini wajar. Kenapa, karena saya merasa ada ketidakharmonisan komunikasi antara Satgas Kota dan Provinsi," paparnya saat ditemui di DPRD Batam, Kamis (24/2/2022).

Udin melihat ketidakharmonisan ini, akibat perbedaan sistem pengawasan antara dua kawasan koridor Travel Bubble Nongsa Sensation Batam, dengan koridor Travel Bubble Lagoi Bintan.

Satu poin penting ketidakharmonisan ini, adalah perbedaan sikap yang terjadi antara Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dengan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

"Kalau begini terus, nanti kebijakan Travel Bubble Kepri dicabut lagi. Tentu akan berpengaruh ke masyarakat lagi. Belum lagi kemungkinan penyebaran, dan perekonomian kita akan anjlok lagi," terangnya.

Pada koridor Travel Bubble Lagoi Bintan, diketahui bahwa area tersebut kini telah di sterilkan, dengan keberadaan petugas Satgas yang dibantu TNI-Polri pada area masuk dan keluar kawasan.

Hal berbeda kemudian terjadi di koridor Travel Bubble Nongsa Sensation, dimana Tim Satgas berada di kawasan masing-masing Resort, dan pengawasan dilakukan dengan memberdayakan seluruh petugas keamanan area.

"Satu yang perlu diingat, dari dulu sebelum pandemi. Wisman Singapura atau dari Negara manapun. Tidak sah rasanya ke Batam, apabila belum ke daerah Nagoya. Yang kita minta saat ini, adalah kepastian. Apakah memang apa yang dilakukan Kota saat ini, benar-benar bisa menjamin Wisman tidak akan berjalan-jalan ke daerah di luar Travel Bubble selama mereka karantina," tegasnya.

Dengan adanya aturan karantina sementara bagi Wisman, sebelum diperbolehkan untuk mengunjungi daerah lain di Batam.

Udin melihat ketatnya pengawasan memang sangat diperlukan, dan menjadi poin penting.

"Bukan tidak memperbolehkan mereka ke daerah lain. Tapi kan memang ada aturan karantina sementara, makanya koridor Travel Bubble hadir," tegasnya. **(*)**

VISI DAN MISI

Visi merupakan sesuatu yang dicanangkan, sesuatu yang sangat mungkin terwujud. Visi dapat juga dikatakan sebagai cita-cita yang hendak dicapai (the ultimate goal). Visi bukanlah mimpi tetapi cita-cita yang dapat dicapai. Oleh karena itu Sekretariat DPRD Kota Batam memiliki Visi :

PERNYATAAN VISI

"TERWUJUDNYA SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM YANG PROFESIONAL DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI DPRD MELALUI TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK"

Sekretariat DPRD Kota Batam yang profesional mengutamakan sikap dan perilaku yang mampu memberikan kepuasan dalam pelayanan terbaik. Profesional adalah kemampuan Sekretariat DPRD yang benar-benar memenuhi standar dalam memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam didasarkan pada tupoksinya sebagaimana diamanatkan undang-undang serta memberikan pelayanan kepada masyarakat (public services) secara tanggap, transparan, efektif dan efisien dalam upaya mendukung tata pemerintahan yang baik.

Misi merupakan jawaban terhadap visi yang ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain misi merupakan penjabaran dari visi yang menggambarkan secara lebih jelas akan tujuan suatu organisasi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Batam mencanangkan visinya kedalam 6 (enam) misi sebagai berikut :

MISI

1. Meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme SDM yang menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan humas, dokumentasi, data dan informasi.
3. Meningkatkan kualitas kinerja DPRD.
4. Mengembangkan profesionalisme pengelolaan administrasi dan keuangan serta pelayanan kepada DPRD.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD.
6. Meningkatnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MEDIA KOMUNIKASI & INFORMASI
BULETIN
DPRD KOTA BATAM
Laksanakan Fungsi Bangun Negeri

PELINDUNG
Pimpinan DPRD Kota Batam
Nuryanto,SH,MH
(Ketua)
Muhammad Kamaluddin
(Wakil Ketua I)
Muhammad Yunus Muda, SE
(Wakil Ketua II)
Ahmad Surya
(Wakil Ketua III)

PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris DPRD Kota Batam
Aspawi Nangali,S.Sos, MM

PIMPINAN REDAKSI
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
Sekretariat DPRD Kota Batam
Ade Sofiyan,SSTP,MH

REDAKTUR PELAKSANA
Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Kota Batam
Nopriman Abdullah,SE,.MM

REDAKTUR
Johan Santoso
Aldy
Eka Frorida Butar-butar, A.Md

FOTOGRAFER
Ridho Tambunan
Wira Atmajaya
M. Amin Irvandi
Wahyu Perry Dian

STAFF REDAKSI
Evelianti Siburian,S.Pd
Ima Sartika Simanjuntak, S.S
Erwina, S.I.Kom
Putri Mayasari
Rima Yanhar, S.IP
Roy Sander Natanael Siahaan, A.Ak
Aprizal, SE
Risza Ayunir Almadina,S.Akun

SEKRETARIAT
GEDUNG DPRD KOTA BATAM
Jl. Engku Putri, No.4
Batam Centre, Kepulauan Riau
Telp : (0778) 467691,467632
Fax : (0778) 467648

Website : www.dprd.batam.go.id
E-Mail : dprdkotabtm@gmail.com

WARGA MERLION PROTES GELPER DEKAT PERMUKIMAN, DPRD BATAM MINTA SATPOL PP PROSES

WARGA Merlion Protes Gelper Dekat Permukiman, DPRD Batam Minta Satpol PP Proses

BATAM – Sejumlah perangkat RT bersama warga perumahan Merlion Square Tanjung Uncang, mengeluhkan keberadaan gelanggang permainan (gelper) ke Komisi I DPRD Kota Batam. Pasalnya lokasi Gelper (Spur Game_red) yang berdekatan dengan Permukiman beroperasi 24 jam setiap hari.

"Banyak warga yang mengadu ke kami keberadaan gelper dekat dengan permukiman, sehingga kami sampaikan ke sini (DPRD)," ujar Amrizal, Ketua RT 04/RW 20 Perumahan Merlion Square, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Batam, Kamis (17/3/2022).

Ditambahkannya, upaya warga menolak keberadaan gelper di dekat permukiman, sudah disampaikan ke pejabat Lurah Batu Aji dan juga Polsek Batu Aji. Namun belum ada tindak lanjut, arena gelper hingga saat ini masih beroperasi bebas.

"Kami juga berharap agar lokasi gelper atau sejenis permainan lainnya ditinjau kembali, tidak pantas rasanya apabila berada berdekatan dengan permukiman. Kami tidak mau anak-anak kami terpengaruh buruk dan tumbuh dengan dunia judi atau gelper," tambah Amrizal.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam, Firmansyah melalui Kabid Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan, membenarkan telah menerima surat penolakan warga Merlion Square yang disampaikan melalui perangkat Lurah pada 7 Maret 2022.

"Hasil dari pengecekan kami di lapangan memang kami temukan kegiatan gelanggang permainan (gelper) atau saat ini disebut arena permainan," ujar Kabid.

Dari data yang dimiliki tim PTSP, PT Naga Mas Sakti (Spur Game_red) tidak memiliki izin untuk menggelar arena permainan atau sejenisnya. PT Naga Mas Sakti hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang tercatat di sistem Online Single Submission (OSS) PTSP, hanya 1 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang terdaftar pada tanggal 18 Juni 2019. Yakni industri mesin dan peralatan kantor lainnya perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesoris.

"Dari persyaratan perizinan memang tidak ada didalam sistem OSS untuk arena permainan yang dimaksut, dalam artian gelper ini belum memiliki izin," ucapnya.

Kondisi ini PTSP didorong untuk melakukan pembinaan atau pendampingan kepada pelaku usaha dalam mengaplikasikan proses perizinan usaha yang semakin mudah melalui layanan online.

Safari Ramadhan, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam didampingi Anggota Komisi 1 lainnya mengatakan, DPRD sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat untuk mencari solusi dari sebuah persoalan. Dalam RDP, juga mengundang Kasatpol PP, PTSP dan pelaku usaha.

"Dari hasil RDP dapat diambil kesimpulan bahwa ada efek sosial dari gelper jadi keluhan warga Merlion. Warga sangat terganggu dengan keberadaan gelper didekat permukiman, terlebih persoalan keamanan dan dekat dengan rumah ibadah dan sekolah," ujar Safari.

Safari berpesan ke pihak stakeholder yakni PTSP dan Satpol PP untuk mengawal proses perizinan yang sama-sama disepakati untuk diurus dalam waktu satu minggu.

"Kita kasih kesempatan satu Minggu, apabila izin arena permainan belum ada izin usaha yang sesuai, sesuai kesepakatan bersama untuk tidak ada kegiatan operasional gelper sesuai Perda dan Perwako terkait izin usaha," tutup Politisi dari Partai Amanat Nasional.

Bonatua Hutagalung penanggung jawab Gelper yang hadir dalam RDP berjanji akan mengurus perizinan arena permainan.
(yusuf riadi)

KETUA KOMISI I DPRD KOTA BATAM LIK KHAI HADIRI LAW FIRM ANDI FADLAN AND PARTNERS

Buka Kantor Cabang di Batam, Mudahkan Jangkauan Warga yang Mencari Keadilan

UNTUK lebih dekat menjangkau masyarakat kota Batam yang mencari keadilan, Law Firm Andi Fadlan & Partners resmi membuka kantor barunya di Komplek Nagoya Newton Blok J No. 3-5 Lubuk Baja, Batam, Jumat, 18 Maret 2022.

Kegiatan peresmian kantor tersebut dihadiri oleh, Walikota Batam Muhammad Rudi, Ketua Komisi I Dprd Kota Batam Lik Khai, Soerya Respationo, rekan-rekan advokat serta seluruh mitra kerja Law Firm Andi Fadlan & Partners.

Doktor Fadlan mengatakan, kantor ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2018. Sebelumnya hanya kantor biasa saja. Kemudian ia dan Andi menyamakan persepsi serta visi untuk bisa membangun sebuah firma hukum lebih berkompeten dan profesional.

"Setelah menyatukan tekad dan visi akhirnya saya mendirikan kantor hukum bersama andi dan rekan-rekan lainnya. Kita berharap masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan bisa kita support," katanya.

Kata Fadlan, setelah sepakat pihaknya pertama kali mendirikan kantor hukum di Jakarta. Lalu, kantor hukum yang ada di Batam saat ini, merupakan kantor cabang.

"Kantor pusatnya itu pertama kali berdiri di Jakarta, berisikan 10 pengacara dari berbagai macam latar keilmuan dibidang hukum. Di antaranya Hukum Perdata, hukum perusahaan, Hukum Pidana, Korporasi, PKPU & Kepailitan dan sebagainya," katanya.

Seiring berjalannya waktu, dirinya dipercaya untuk menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Batam tahun pada 2016. Di tahun 2018 hingga tahun 2021, ia kembali diamanahkan menjabat sebagai Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan.

Fadlan juga mengatakan, dengan berdirinya Kantor Pengacara Law Firm Andi Fadlan & Partners di kota Batam, tentunya dapat lebih mengaktualisasikan ilmu yang selama ini dipelajari dan diajarkannya sebagai seorang akademisi, sebab seorang akademisi juga mempunyai misi mengabdikan diri ditengah masyarakat sebagaimana amanah dari salah satu Tridarma Perguruan Tinggi.

"Artinya tanggung jawab saya sebagai seorang akademisi itu bisa mengedukasi. Bisa memberikan sebuah pemahaman bagi masyarakat pencari keadilan. Sehingga, masyarakat dapat dan bisa mendapatkan bantuan apabila tersandung masalah hukum," katanya.

Fadlan juga menjelaskan, banyak orang beranggapan tujuan menjadi pengacara adalah ingin kaya. Ia memilih profesi sebagai pengacara karena melihat banyak konflik permasalahan hukum dan itu membuatnya terpanggil serta ingin memberikan edukasi yang nyata dan konkrit di masyarakat terkait hukum.

"Saya menjadi pengacara bukan untuk kaya. Karena berbekal skill yang saya miliki sebagai seorang akademisi (penghasilan) saya sudah cukup. Mulai dari mengisi seminar, menjadi seorang instruktur, hingga menjadi seorang ahli sesuai bidang yang saya miliki. Artinya saya harus terjun langsung dan mengawal setiap penegakan hukum. Wadahnya adalah melalui jalan kantor hukum atau sebagai lawyer," katanya.

Fadlan mengatakan, kedepan pihaknya akan membangun pusat kajian kebijakan publik dan kebijakan pemerintahan. Ini merupakan, cara kita mendukung pemerintah dalam memajukan kepri khususnya kota Batam.

"Nantinya kita juga akan membangun pusat kajian untuk membantu pemerintah," katanya. **(*)**

SAMBUT Ramadhan 2022, Sekolah Insan Harapan Gelar Pawai Ta'aruf dan Berbagai Kegiatan

SAMBUT RAMADHAN 2022, SEKOLAH INSAN HARAPAN GELAR PAWAI TA'ARUF DAN BERBAGAI KEGIATAN

Setelah pawai ada fashion show berupa barang-barang bekas seperti kantong plastik, kantong kresek makanan, koran yang jadi kreativitas dari anak-anak didik SIT

Muhammad Syafei
Anggota DPRD Kota Batam

BATAM- Sekolah Insan Terpadu (SIT) Insan Harapan menggelar Pawai Ta'aruf dan berbagai kegiatan untuk menyambut Ramadhan 2022/1443 Hijriah di Alun-alun SP Plaza, Sabtu 26 Maret 2022 sore.

Hadir dalam pawai tersebut Pembina Yayasan Harapan Ibu Kepri sekaligus Anggota DPRD Kota Batam Muhammad Syafei, Ketua Yayasan Harapan Ibu Kepri Suharmanto, Direktur SIT Indra Ru'yani, Kepsek RA Nurlaila, Kepsek SDIT Fadhli dan Kepsek SMPIT dan SMAIT, Abdul Majid.

Pembina Yayasan Harapan Ibu Kepri sekaligus Anggota DPRD Kota Batam Muhammad Syafei mengatakan, kegiatan tersebut melibatkan seluruh siswa RA, SDIT, SMPIT, SMAIT dan Pondok Pesantren Insan Qur'ani Nahdatul Wathon.

"Ada sekitar dua ribuan yang hadir dan tumpah ruah memutihkan alun-alun SP Plaza sore ini," kata Syafei.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan seperti pawai ta'aruf Ramadhan, street fashion sholat, drum band attraction dan challenge kafilah terheboh.

"Setelah pawai ada fashion show berupa barang-barang bekas seperti kantong plastik, kantong kresek makanan, koran yang jadi kreativitas dari anak-anak didik SIT," katanya.

Syafei berharap dengan kegiatan tersebut para siswa siap menyiapkan diri secara lahir dan batin menjalani ibadah di bulan Ramadhan.

"Agar Ramadhan tahun ini kita persembahkan dan bertekad serta berniat untuk memberikan Ramadhan yang terbaik dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga menjadikan kita orang bertakwa di sisi Allah SWT," katanya.***

USULAN RANPERDA TENTANG DANA BOS DAERAH BELUM DISETUJUI OLEH PEMKO BATAM

USULAN Ranperda tentang Dana BOS Daerah Belum Dapat Disetujui oleh Pemerintah Kota Batam

BATAM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam telah mengajukan usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Usulan Ranperda ini berlandaskan atas tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat, sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Ides Mardi, sebelumnya menilai bahwa dana BOS yang diberikan oleh pemerintah pusat belum dapat menutupi seluruh kebutuhan peserta didik di daerah. Selain itu, menurutnya, kondisi geografis antara wilayah Hinterland dan Mainland yang berbeda harus menjadi pertimbangan dalam penetapan dana BOS daerah tersebut.

“Maka sudah sepantasnya pemerintah bersama pihak sekolah, terutama sekolah swasta saling bersinergi guna menghasilkan mutu dan kualitas pendidikan yang baik," jelas Ides beberapa waktu lalu.

Usulan ini pun memperoleh tanggapan positif dari Wali Kota Batam, yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (7/3/2022) siang.

Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyatakan bahwa usulan ranperda tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Pendapat ini berdasarkan pertimbangan dalam rangka mengantisipasi potensi implikasi hukum di kemudian hari.

"Pada prinsipnya Pemko Batam menyambut baik usulan ranperda dimaksud. Tetapi perlu pengkajian secara komprehensif mengingat potensi overlapping pada tahap pelaksanaan," ujar Amsakar.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan, di antaranya, pertama, sekolah negeri dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) di Kota Batam sama-sama telah mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) fisik, baik dari APBD dan APBN.

Lalu, sekolah swasta mendapatkan bantuan yang sama dengan sekolah negeri, yakni bantuan dana BOS Kinerja. Sekolah swasta juga telah mendapat bantuan media pendidikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sesuai kebutuhan dalam daftar data pokok pendidikan (Dapodik).

"Selain itu, sekolah swasta dapat menentukan sendiri besaran biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) serta uang pembangunan. Kalau dibandingkan, pembiayaan operasional sekolah negeri hanya bersumber dari dana BOS dan dilarang meminta sumbangan dari orangtua atau wali murid," jelas Amsakar.

Dengan demikian, pihaknya menilai, sekolah swasta memiliki berbagai macam sumber pendanaan yang dapat diperoleh sehingga menjadikannya secara komposisi anggaran pembiayaan sudah lebih terjamin.

Amsakar menyoroti, sesuai ketentuan pasal 4 ayat 2 Ranperda tentang Dana BOS bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, disebutkan bahwa satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan yakni sekolah tidak sedang menerima dana BOS dari kementerian.

"Kami jelaskan bahwa seluruh satuan pendidikan yang terdata dalam dapodik sudah menerima dana BOS. Sehingga apabila ranperda ini tetap dilanjutkan, maka kami berpandangan produk hukum ini tidak akan efektif pada tataran pelaksanaannya," tambah Amsakar.

Setelah pandangan umum dari Pemko Batam ini disampaikan dalam forum Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, maka selanjutnya masing-masing fraksi akan menyampaikan jawabannya pada rapat paripurna mendatang**. (hsu)**

KETUA DPRD KOTA BATAM, NURYANTO, SH, MH MENGHADIRI UNDANGAN GRAND OPENING NADY COFFEE

KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto, SH, MH Menghadiri Undangan Grand Opening Nady Coffee. Sabtu, 19 Maret 2022.Kegiatan berlangsung di Kaliban Trade Center Blok D.23-D.23A, Punggur, Nongsa.

KOMISI I DPRD BATAM KUNJUNGI KANTOR IMIGRASI, BERI APRESIASI DALAM PELAYANAN DAN KEMUDAHAN KE WARGA

KOMISI I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Senin (21/3/2022).

BATAM – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Senin (21/3/2022).

Kunjungan itu tertuang dalam silahturahmi, koordinasi, dan komunikasi antar pejabat pemerintah khususnya di Batam.

Dalam kunjungan itu, hadir juga di antaranya Ketua Komisi I DPRD Batam Lik Khai didampingi Wakil Ketua Safari Ramadhan bersama anggota Utusan Sarumaha dan Tan A Tie.

Sementara, dari pihak Imigrasi hadir Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Subki Miuldi didampingi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Kantor Imigrasi Khusus (Kanimsus) Batam.

Lik Khai mengatakan bahwa, tujuan kedatangan pihaknya ialah sebagai ajang perkenalan antarkedua lembaga.

“Sebagaimana kita ketahui, kedua pimpinan di masing-masing lembaga ini sama-sama baru,” sebut Lik Khai.

Ia memberikan apresiasi terhadap kinerja positif yang telah ditorehkan oleh Kantor Imigrasi Batam dalam melakukan pelayanan dan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat.

“Kami mengapresiasi kinerja positif yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Batam selama ini,” ujarnya.

Senada yang diucapkan Lik Khai, Anggota Komisi I DPRD Batam, Utusan Sarumaha, mengatakan, pertemuan tersebut merupakan silaturahmi Komisi I dengan Imigrasi Kota Batam.

“Pertemuan ini sangat bahagia sekali dimana diskusi ini berjalan dengan hangat. Kami juga mempertanyakan berbagai kendala yang dihadapi selama ini oleh masyarakat, namun alhamdulillah dari penyampaian Kepala (Kanim) tadi, sangat selektif sekali. Salut dan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Batam yang selama ini telah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat,” katanya.

Pihaknya juga berharap, dengan kerja sama yang sudah terjalin harmonis selama ini, antara Komisi I DPRD Batam dengan Kantor Imigrasi Batam bisa lebih ditingkatkan lagi ke depannya.

Sementara, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Subki Miuldi, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kunjungan silaturahmi yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Kota Batam ke kantornya.

Dia pun meminta maaf jika seandainya dalam penyambutannya terdapat kekurangan. Diakui memang baru pertama kalinya dilakukan, sejak dirinya menjadi Kepala Kantor.

“Mewakili seluruh pegawai Imigrasi Batam kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyambutannya. Komisi I DPRD Batam baru perdana ke Kantor Imigrasi Batam, tentu banyak yang dibahas dalam pertemuan yang berlangsung cukup lama tersebut. Ini tidak lain ialah untuk menjalin silahturahmi yang baik ke depannya, dan semoga dpsat terus dijaga,” ujarnya. **(IIh4m)**

RAMAI-RAMAI ANGGOTA DPRD BATAM TOLAK PERWAKO 1 TAHUN 2022

Dalam setahun kami dari fraksi Hanura bisa melakukan 18 kali reses atau kunjungan kerja ke masyarakat kami. Dalam setiap reses, banyak keluhan masyarakat yang harus kami akomodir, dan harus disampaikan ke OPD Pemko Batam. Tapi kini hanya dibatasi total 20 usulan yang sekali lagi saya tekankan merupakan masukkan dari masyarakat

Rubina
Perwakilan Fraksi Hanura

BATAM - Anggota DPRD Kota Batam ramai-ramai menolak Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 1 Tahun 2022 dalam rapat Paripurna, yang dihadiri Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad di DPRD Batam, Rabu (2/3/2022).

Pada Perwako ini, Pemerintah Kota (Pemko) Batam melakukan penegasan mengenai pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini, kebijakan pengembangan daerah yang datang dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Batam, mendapat pembatasan menjadi 20 pokir yang akhirnya dapat diusulkan agar segera dilaksanakan oleh Pemko Batam.

"Dalam setahun kami dari fraksi Hanura bisa melakukan 18 kali reses atau kunjungan kerja ke masyarakat kami. Dalam setiap reses, banyak keluhan masyarakat yang harus kami akomodir, dan harus disampaikan ke OPD Pemko Batam. Tapi kini hanya dibatasi total 20 usulan yang sekali lagi saya tekankan merupakan masukkan dari masyarakat," tegas perwakilan Fraksi Hanura, Rubina.

Menurutnya, pembatasan ini sangat tidak masuk akal, melihat saat ini permasalahan infrastruktur, dan fasilitas pendukung bagi masyarakat di Kota Batam masih belum dapat terpenuhi.

Salah satunya adalah fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak di wilayah pemukiman, yaitu keberadaan Posyandu yang kini diketahui memerlukan perhatian lebih dari Pemko Batam.

"Di tempat saya, ada Posyandu yang sudah sangat tidak layak. Para tenaga yang ada disana tapi tetap melakukan tanggung jawab mereka. Kalau dibatasi seperti ini, proyek fisik yang dekat ke masyarakat tentu akan terlewat nantinya," terangnya.

Hal senada juga dilontarkan oleh perwakilan fraksi PKB, Aman yang meminta dengan tegas agar Pemko Batam dapat merevisi Perwako 1 Tahun 2022.

Aman menegaskan bahwa seharusnya Pemko Batam, tidak membatasi usulan masyarakat.

"Reses adalah forum resmi yang diatur undang-undang, mewajibkan anggota DPRD menampung aspirasi masyarakat. Pemko seharunya ikut menampung hasil reses kami, dan bukan membatasinya," papar Aman.

Di lokasi terpisah, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad belum dapat dapat menjawab mengenai penolakan para anggota DPRD.

Pihaknya mengaku masih menampung aspirasi, mengenai usulan revisi Perwako Nomor 1 Tahun 2022.

"Saat ini akan kami tampung dulu, sembari nanti kalau memang perlu akan dilakukan perubahan. Karena memang pokir itu, saat ini tidak semuanya dapat direalisasikan," tegas Amsakar. **(*)**

TAK TERIMA DIPECAT KARENA PUNGLI, SEORANG KARYAWAN RS AWAL BROS MENGADU KE DPRD BATAM

TAK Terima Dipecat karena Pungli, Seorang Karyawan RS Awal Bros Mengadu ke DPRD Batam

BATAM - Seorang karyawan Rumah Sakit Awal Bros Batam atas nama Sondang Olivia, mengadu ke DPRD Kota Batam karena tak terima pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pihak manajemen RS Awal Bros, atas tuduhan melakukan pungutan Liar.

Sondang Olivia mengatakan, PHK atas dugaan pungli setelah 15 tahun bekerja dianggapnya sebuah ketidakadilan.

Di hadapan anggota DPRD Batam dalam gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV yang membidangi Kesehatan dan Ketenaga kerjaan, Sondang Olivia mengungkapkan kronologi kejadian yang menimpa dirinya itu.

Awalnya saat ingin pulang setelah bekerja sebagai accounting rumah sakit, mobil yang dikendarainya tidak bisa keluar parkiran rumah sakit lantaran terhalang mobil seorang pasien. Olivia mengatakan, dirinya sempat melapor ke pihak sekutiri dan pengelola parkir.

"Saya menunggu hingga dua jam di dalam mobil, setelah melaporkan ke sekuriti dan pengelola parkir, dengan kondisi mobil menyala dan menghidupkan pendingin," kata Sondang Olivia saat RDP di Kantor DPRD Batam, Senin (14/3/2022).

Setelah menunggu hingga dua jam, pemilik mobil yang menghalangi mobilnya datang dan mau pergi begitu saja, tanpa merasa bersalah, lalu Sondang Olivia menegur dan memberitahukan kesalahan ibu pemilik mobil itu.

"Saya tegur dan kasih tau kesalahannya, akhirnya dia juga minta maaf dan memberikan kompensasi uang ganti minyak mobil sebesar Rp500 ribu (tanpa paksaan) dan di saksikan pihak sekuriti dan pengelola parkir RS Awal Bros," ucap Olivia.

Berselang beberapa hari kemudian menurut pengakuan Olivia ada seseorang oknum PBJS ketanagakerjaan yang berkantor di Sekupang Batam, melaporkan kejadian tersebut ke pihak manajemen RS Awal Bros, dengan tuduhan bahwa Olivia melakukan pungli kepada salah seorang pasien RS Awal Bros.

"Di saat saya mengisi bahan bakar di SPBU, saya ditelepon dari pihak rumah sakit, bahwa ada oknum BPJS kesehatan yang melaporkan, kalau saya melakukan pungli. Oknum tersebut mengaku kalau dia suami dari ibu yang menghalangi mobil saya. Terakhir ketahuan kalau dia bukan suami ibu itu, oknum tersebut meminta saya untuk mengembalikan uangnya dan saya harus meminta maaf," ungkapnya.

Setelah itu ia mengaku mendapat tekanan serta mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari pihak rumah sakit, mulai dari mutasi pekerjaan yang tidak semestinya, bahkan tidak diizinkan untuk mengakses komputer di ruangannya,

Yang berikutnya pihak Manajemen (HRD) Rumah Sakit pemberian surat peringatan (SP) satu sampai ketiga tanpa jeda hingga berujung ke PHK pada 9 Februari 2022. **(*)**

DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KETUA HINGGA ANGGOTA 4 KOMISI DPRD BATAM TERBARU

DAFTAR Nama dan Susunan Ketua hingga Anggota 4 Komisi DPRD Batam Terbaru

BATAM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam mengubah susunan keanggotaan alat kelengkapan, dalam rapat paripurna, Selasa (9/3/2022).

Selain menunjuk anggota Badan Kehormatan (BK), DPRD Kota Batam juga menyepakati susunan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), yang kini diketuai oleh Muhammad Mustofa dengan Wakil Ketua, Sahat Parulian.

Selain itu, DPRD Kota Batam juga menetapkan susunan baru empat komisi, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.

Ada beberapa Komisi DPRD Kota yang mengubah struktur anggotanya. Contohnya seperti, Ketua Komisi I yang kini dijabat Lik Khai (Nasdem).

Sebelumnya, Lik Khai menjabat sebagai Sekretaris Komisi I. Sedangkan, Wakil Ketua Komisi I kini dijabat Safari Ramadhan (PAN), dan Tumbur M Sihaloho (PDIP) dipercaya menjadi Sekretaris Komisi I, sebelumnya pria berkacamata ini menjabat Sekretaris Komisi IV.

Pergeseran juga berlaku di Komisi II DPRD Kota Batam.

Jabatan Ketua diamanahkan kepada Putra Yustisi Respaty (PDI-Perjuangan), Wakil Ketua, Edward Brando (PAN), dan Sekretaris diisi oleh Azhari David Yolanda (Nasdem).

Selanjutnya, perubahan juga terjadi di Komisi III DPRD Batam. Posisi Ketua dijabat Djoko Mulyono (Partai Golkar), Wakil Ketua, Siti Nurlailah (PKS), sedangkan Sekretaris, Muhammad Rudi (Gerindra).

Berikutnya, Komisi IV, kali ini diketuai oleh Capt Luther Jansen (Gerindra), menggantikan Ides Madri (Golkar). Lalu, Wakil Ketua yakni Aman (PKB) dan Sekretaris, Nina Mellanie (Golkar).

Adapun susunan anggota empat komisi DPRD Batam adalah sebagai berikut:

Ketua: Lik Khai (Nasdem)
Wakil Ketua: Safari Ramadhan, S.Pd.I (PAN)
Sekretaris: Tumbur M Sihaloho, S.E. (PDIP)
Anggota:
- Budi Mardiyanto, SE., MM (PDIP)
- Tohap Erikson Pasaribu (PDIP)
- Jimmy SM Nababan, SH (Golkar)
- Harmidi Umar Husein, SH (Gerindra)
- Amri, SE (PKS)
- Utusan Sarumaha, SH (Hanura)
- Muhammad Fadhli (PKB)
- Tan A Tie (Demokrat-PSI)

Komisi II (Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri)
Ketua: Putra Yustisi Respaty (PDIP)
Wakil Ketua: Edward Brando, SH (PAN)
Sekretaris: Azhari David Yolanda, SH., MH (Nasdem)
Anggota:
- Dandis Rajagukguk, ST (PDIP)
- Asnawati Atiq, SE., MM (Nasdem)
- Hendra Asman, SH., MH (Golkar)
- Rahmad (Golkar)
- Werton Panggabean, SH., MH (Gerindra)
- Muhammad Syafei, ST (PKS)
- Leo Anggara Saputra, SH (PAN)
- Ir. Rubina Situmorang (Hanura)
- Hendrik (PKB)
- Sahat Parulian Tambunan, SE (Demokrat-PSI)

Komisi III (Bidang Pembangunan, Sarana, Prasarana dan Lingkungan)
Ketua: H Djoko Mulyono, SH., MH (Golkar)
Wakil Ketua: Siti Nurlailah, ST., MT (PKS)
Sekretaris: Muhammad Rudi, ST (Gerindra)
Anggota:
- Thomas Arihta Sembiring, S.Sos (PDIP)
- Arlon Veristo (Nasdem)
- Amintas Tambunan (Nasdem)
- Rohaizat, ST., MM (PKS)
- Biyanto (PAN)
- Tumbur Hutasoit, SH (Hanura)
- Dominggus Roslinus Rega Woge (PKB)
- Muhammad Yunus, S.Pi, MM (Demokrat-PSI)

Komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia)
Ketua : Capt Luther Jansen, M.Mar (Gerindra)
Wakil Ketua: Aman, S.Pd., MM (PKB)
Sekretaris: Nina Mellanie, B.Bus., MM (Golkar)
Anggota:
- Udin P Sihaloho, SH (PDIP)
- Taufik Muntasir (Nasdem)
- Drs. Ides Madri, MM (Golkar)
- Ir. Mulia Rindo Purba, M.Si (Gerindra)
- Muhammad Mustofa, SH., MH (PKS)
- H Sahrul (PAN)
- Bobi Alexander Siregar (Hanura)
- H Sumali, SE (Demokrat-PSI).

(TRIBUNBATAM.id/Hening Sekar Utami)

PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KOTA BATAM
Mengucapkan
Dirgahayu
BADAN NARKOTIKA
NASIONAL
WAR ON DRUGS
HUT BNN RI
MENGABDI
MENUJU INDONESIA BERSINAR
MENUJU INDONESIA
BERSINAR
BERSIH NARKOBA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
Kebersamaan Laksanakan Fungsi
Solidaritas Bangun Negeri
dprd_kotaBatam
@dprdbatam
Dprdkota Batam
dprdbatamku

DPRD
KOTA BATAM
SUKSESKAN
MTQ XXXI
TINGKAT KOTA BATAM
TAHUN 2022
Laksanakan Fungsi
Bangun Negeri
NURYANTO,SH.,MH
KETUA DPRD KOTA BATAM

AMSAKAR TAMPUNG MASUKAN DPRD BATAM

Kita tetap melihat kemampuan APBD. Proyeksi yang harus diraih nanti kelihatan di Musrenbang tingkat Kota Batam. Pokir ini bisa diselaraskan dengan Renja OPD maupun PSPK

Amsakar Achmad
Wakil Wali Kota Batam

BATAM – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menampung masukan yang disampaikan sejumlah Anggota DPRD Batam terkait Peraturan Wali Kota (Perwako) 1/2022.

Masukan tersebut disampaikan sejumlah Fraksi DPRD Batam saat Rapat Paripurna terkait Laporan Reses DPRD Kota Batam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022 di Kantor DPRD Batam, Rabu (2/3/2022).

Perwako tersebut salah satunya mengatur Pokok-pokok Pikirian (Pokir) DPRD Batam yang hanya dibatasi sebanyak 20 usulan.

Dalam penyampaian hasil reses, Amsakar mengatakan, sembilan fraksi yang ada menyampaikan harapan dari masyarakat yang diakomodir DPRD Batam. Usulan tersebut antara lain terkait infrastruktur, posyandu, dan berbagainya.

"Hasil reses ini merupakan masukan yang disampaikan masyarakat dari dapil masing-masing," katanya.

Kemudian, tekait jumlah batasan usulan, pihaknya sudah menggelar rapat pimpinan DPRD Batam usai rapat Paripurna. Dalam rapat itu, Amsakar menyampaikan pada pronsipnya, Pokir akan disejalankan dengan proses perencanaan lain yang masuk melalui Musrenbang, Pokja OPD, dan sebagainya.

"Kita tetap melihat kemampuan APBD. Proyeksi yang harus diraih nanti kelihatan di Musrenbang tingkat Kota Batam. Pokir ini bisa diselaraskan dengan Renja OPD maupun PSPK," katanya.

Dalam paripurna, perwakilan Fraksi PKB-PPP, Aman, menyampaikan, selama reses yang dilakukan selama enam hari, 17-23 Februari 2022, banyak aspirasi dari masyarakat kepada Anggota DPRD Batam sebagai fungsi legislator demi kesejahteran masyarakat.

Namun, banyaknya usulan tersebut terbatas dengan jumlah kuota yang diberikan untuk DPRD Batam yang diatur dalam Perwako 1/2022.

Senada, Fraksi Hanura yang disampaikan Rubina Situmorang, dan Fraksi Gerindra yang disampaikan Muhammad Rudi, juga menyampaikan persoalan serupa yang ingin ada pembahasan lanjutan terkait pembatasan tersebut.

"Hasil rapat ini akan kami sampaikan ke Wali Kota Batam, Muhammad Rudi," kata Amsakar. **(*)**

ANGGOTA DPRD BATAM SOROTI RENCANA PEMKO TAMBAH MODAL DI BANK RIAU KEPRI

Khusus Bank Riau Kepri ini, memang kerjasamanya lumayan lama dengan Pemko Batam. Kita pun sudah dapat informasi dari Bank Riau Kepri

Udin P Sihaloho
Anggota DPRD Kota Batam

BATAM- Pemerintah Kota (Pemko) Batam berencana menambah nominal penyertaan modal ke PT Bank Riau Kepri sebanyak Rp 100 miliar.

Hal ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemko Batam pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Udin P Sihaloho.

"Khusus Bank Riau Kepri ini, memang kerjasamanya lumayan lama dengan Pemko Batam. Kita pun sudah dapat informasi dari Bank Riau Kepri," ujar Udin, Kamis (31/3/2022).

Udin menyoroti rencana Pemko Batam itu, lantaran PT Bank Riau Kepri bukan milik Pemko Batam. Mengingat selama ini hasil CSR dari PT Bank Riau Kepri tidak dirasakan oleh masyarakat Batam.

"Kenapa tak bank lain, CSR-nya bisa dirasakan masyarakat banyak," katanya.

Tak hanya itu, Udin juga menilai PT Bank Riau Kepri selama ini tidak bersifat transparan kepada DPRD Batam. Salah satunya perihal dana CSR yang dikeluarkan untuk Batam.

"CSR mereka tak transparan. Berapa yang mereka keluarkan dan apa saja yang mereka bangun," katanya.

Dalam hal ini, tim Pansus juga menyarankan agar Pemko Batam mendirikan bank daerah sendiri. Misalnya dengan modal mencapai Rp 200 miliar.

"Bank Daerah Batam contohnya. Kalau sudah sampai Rp 200 milar modalnya, tak ada salahnya dirikan bank sendiri. Kalau daerah lain misalnya Bank Jabar Banten eksis juga di sini," kata Udin.

Tim Pansus juga optimis bank milik Pemko Batam ini bisa lebih berkembang bahkan eksis di Batam. Asalkan bisa dikelola oleh orang yang profesional.

Sisi positif lainnya, bisa juga menampung lapangan pekerjaan untuk warga Batam.

"Pembayaran gaji pegawai, anggota dewan, pembayaran pajak bisa melalui bank milik Pemko Batam ini," katanya.

Sebelumnya, penyertaan modal Pemko Batam di Bank Riau Kepri sebesar Rp 50 miliar atau sebesar 4,52 persen.

Batam menempati urutan ke 6 dari seluruh pemegang saham di Bank Riau Kepri.

"Nah awalnya saham Pemko ada Rp 50 miliar di Bank Riau Kepri lalu Pemko rencana mau tambah Rp 100 miliar jadi totalnya Rp 150 miliar," katanya.

Ia menambahkan, selama ini perputaran uang Pemko Batam di PT Bank Riau Kepri bukan hanya dari Rp 50 miliar penyertaan modal itu saja.

Menurutnya, pajak restoran yang dibayarkan warga Batam dan dipotong melalui tapping box, juga mengendap di Bank Riau Kepri.

"Pengadaan tapping box ini siapa yang lakukan. Pemko atau Bank Riau Kepri? Tapping box ini bisa kita perbanyak. Alasannya Pemko mahal kalau kita sediakan alatnya. Kenapa berharap penuh ke Bank Riau Kepri padahal bank lainpun siap," paparnya.

Seperti diketahui, saat ini Pemko Batam telah mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal di 4 BUMD, yakni :
PT. Pembangunan Kota Batam (Rp 2 miliar),

- PT. Pelabuhan Batam Indonesia (Rp 2 miliar),
- PT. Riau Airlines (RAL) (Rp 2 miliar) dan
- PT. Bank Riau Kepri (Rp 50 miliar).

(tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)

PENGURUS ASKOT PSSI BATAM SEGERA DILANTIK, IDES MADRI GANTIKAN RUSLAN ALI WASYIM

BATAM- Asosiasi Kota (Askot) PSSI Batam periode 2021-2025 segera melantik pengurus barunya.

Rencananya, pelantikan Askot PSSI Batam sendiri bakal dilaksanakan tanggal 26 Maret 2022.

Bertempat di Harmoni One Hotel Batam, Askot PSSI Batam saat ini akan dinakhodai Ides Madri.

Ides Madri dipercaya sebagai Ketua Askot PSSI Batam menggantikan Ruslan Ali Wasyim yang wafat beberapa bulan lalu.

Ketua Panitia Pelaksana Pengukuhan, Tumbur M. Sihaloho mengatakan bahwa kepengurusan Askot PSSI Batam periode 2021-2025 itu sendiri sudah terbentuk sejak beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, agenda pelantikan belum dilakukan akibat sejumlah kendala.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan. Mudah-mudahan rencana tersebut dapat terlaksana dan berjalan lancar,” ujar Tumbur M. Sihaloho yang juga merupakan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Selasa (22/3/2022).

PENGURUS Askot PSSI Batam Segera Dilantik, Ides Madri Gantikan Ruslan Ali Wasyim

Ia mengatakan, usai pelantikan, PSSI Batam langsung menggelar rapat kerja (raker).

Antara lain akan membahas beberapa program kerja ke depannya.

Menurutnya, sebanyak 69 orang pengurus Askot PSSI Batam akan dikukuhkan oleh Asprov PSSI Kepulauan Riau.

Selain itu, pelantikan juga akan dihadiri oleh Walikota Batam/Kepala BP Batam, Muhammad Rudi serta pengurus KONI Batam.**(TribunBatam.id/Ichwan Nur Fadillah)**

Tiap Hari Mati Lampu di Batam,

PENGUSAHA CEMAS BAKAL GANGGU IKLIM INVESTASI

Lik Khai
Ketua Komisi I DPRD Kota Batam

BATAM- Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Lik Khai menerima keluhan dari sejumlah pengusaha terkait pemadaman listrik secara bergilir di Kota Batam.

Mulai dari industri manufaktur, hingga industri pariwisata seperti perhotelan dan restoran.

Pemadaman bergilir ini dinilai menggangu iklim investasi di Kota Batam. Apalagi di saat masa pemulihan ekonomi usai menurunnya pandemi Covid-19 di Batam.

"Saya banyak dapat laporan dari sejumlah pengusaha terkait keluhan mereka terkait pemadaman bergilir di lingkungan industri, terutama pihak hotel. Setiap hari dapat WhatsApp," kata Lik Khai kepada TRIBUNBATAM.id saat berada di ruangannya, Jumat (18/3/2022).

Menurutnya wisman Singapura saat ini sudah diizinkan kembali untuk berwisata ke Batam.

Jadi, dia berharap agar Batam jangan dipermalukan dengan adanya pemadaman listrik bergilir. "Wisman Singapura yang datang udah tanpa karantina di Batam, tapi ada pula pemadaman bergilir, kan malu-maluin. Kalau kita laporkan ke PLN kapan selesainya, mereka tak tahu," katanya.

Ironisnya lagi, apabila pengusaha akan menggunakan listrik harus meminta izin kepada Pemerintah Provinsi Kepri.

Lik Khai berharap pihak terkait bisa mengaudit kembali bright PLN Batam.

Bright PLN Batam, lanjut dia, harus bekerja secara profesional.

Pasalnya setiap tahun pemadaman bergilir kerap dilakukan.

"Tak hanya industri, warga pun juga terganggu. Kita kalau tanggal 20 tak bayar, tanggal 21 listrik udah diputus. Ditambah lagi tarif listrik kita bukannya murah, tapi mahal," kata Lik Khai. **(TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)**

DPRD Gelar Rapat Paripurna

PENYAMPAIAN LAPORAN RESES DPRD KOTA BATAM MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022

DPRD Gelar Rapat Paripurna, Penyampaian Laporan Reses DPRD Kota Batam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022

ANGGOTA DPRD Batam Budi Mardiyanto saat memberi salam kepada Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad

JURUBICARA Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa, Aman, S.Pd,MM bersalaman dengan wakil Ketua II DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Muda

BATAM– Ada hal yang menarik pada rapat paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022 terkait Laporan Reses Anggota DPRD Kota Batam yakni perwakilan Fraksi-fraksi menyampaikan persoalan dan kebutuhan masyarakat. Adapun pesoalan yang disampikan diantaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan sumber data manusia.

Harapan tersebut disampaikan sejumlah Fraksi DPRD Batam saat Rapat Paripurna terkait Laporan Reses DPRD Kota Batam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022 di Ruang Rapat Utama DPRD Batam, Rabu (2/3/2022).

Kesempatan Pertama disampakan oleh Fraksi PDI Perjuangan melalui jurubicara Budi Mardiyanto,SE,MM. Dilanjutkan dengan Fraksi NasDem melalui jurubicaranya Taufik Muntasir, Fraksi Golkar, H.Djoko Mulyono,SH,MH, Fraksi Gerindra, M.Rudi,ST, Fraksi PKS, Amri,SE, Fraksi PAN, H. Sahrul, Fraksi Hanura, Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa, Aman, S.Pd,MM dan Fraksi Demokrat- PSI, H. Sumali,SE.

Jurubicara Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa, Aman, S.Pd,MM menyampaikan, selama reses yang dilakukan selama enam hari, 17-23 Februari 2022, banyak aspirasi dari masyarakat kepada Anggota DPRD Batam sebagai fungsi legislasi, Kontroling dan bugeting demi kesejahteran masyarakat.

PERWAKILAN Fraksi-fraksi menyampaikan persoalan dan kebutuhan masyarakat

Namun, banyaknya usulan tersebut terbatas dengan jumlah kuota yang diberikan untuk DPRD Batam yang diatur dalam Perwako Nomor : 1 Tahun 2022.

Senada, Fraksi Hanura yang disampaikan Ir. Rubina Situmorang, dan Fraksi Gerindra yang disampaikan Muhammad Rudi, ST juga menyampaikan persoalan serupa yang ingin ada pembahasan lanjutan terkait pembatasan tersebut.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, S.Sos menampung masukan yang disampaikan sejumlah Anggota DPRD Batam terkait Peraturan Wali Kota (Perwako) 1/2022. “Hasil rapat ini akan kami sampaikan ke Wali Kota Batam, Muhammad Rudi,” kata Amsakar.

Perwako tersebut salah satunya mengatur Pokok-pokok Pikirian (Pokir) DPRD Batam yang hanya dibatasi sebanyak 20 usulan.

Dalam penyampaian hasil reses, Amsakar mengatakan, sembilan fraksi yang ada menyampaikan harapan dari masyarakat yang diakomodir DPRD Batam. Usulan tersebut antara lain terkait infrastruktur, posyandu, dan berbagainya.

“Hasil reses ini merupkan masukan yang disampaikan masyarakat dari dapil masing-masing,” katanya.

Kemudian, tekait jumlah batasan usulan, pihaknya sudah menggelar rapat pimpinan DPRD Batam usai rapat Paripurna. Dalam rapat itu, Amsakar menyampaikan pada prinsipnya, Pokir akan disejalankan dengan proses perencanaan lain yang masuk melalui Musrenbang, Pokja OPD, dan sebagainya.

“Kita tetap melihat kemampuan APBD. Proyeksi yang harus diraih nanti kelihatan di Musrenbang Tingkat Kota Batam. Pokir ini bisa diselaraskan dengan Rencana Kerja (Renja) OPD maupun PSPK,” katanya. **(HMS/SET)**

ANGGOTA DPRD Batam Budi Mardiyanto memberikan kata sambutan

SUASANA saat sidang paripurna

ANGGOTA DPRD Batam saat berdiskusi

SUASANA saat sidang paripurna

ANGGOTA DPRD Batam saat berdiskusi